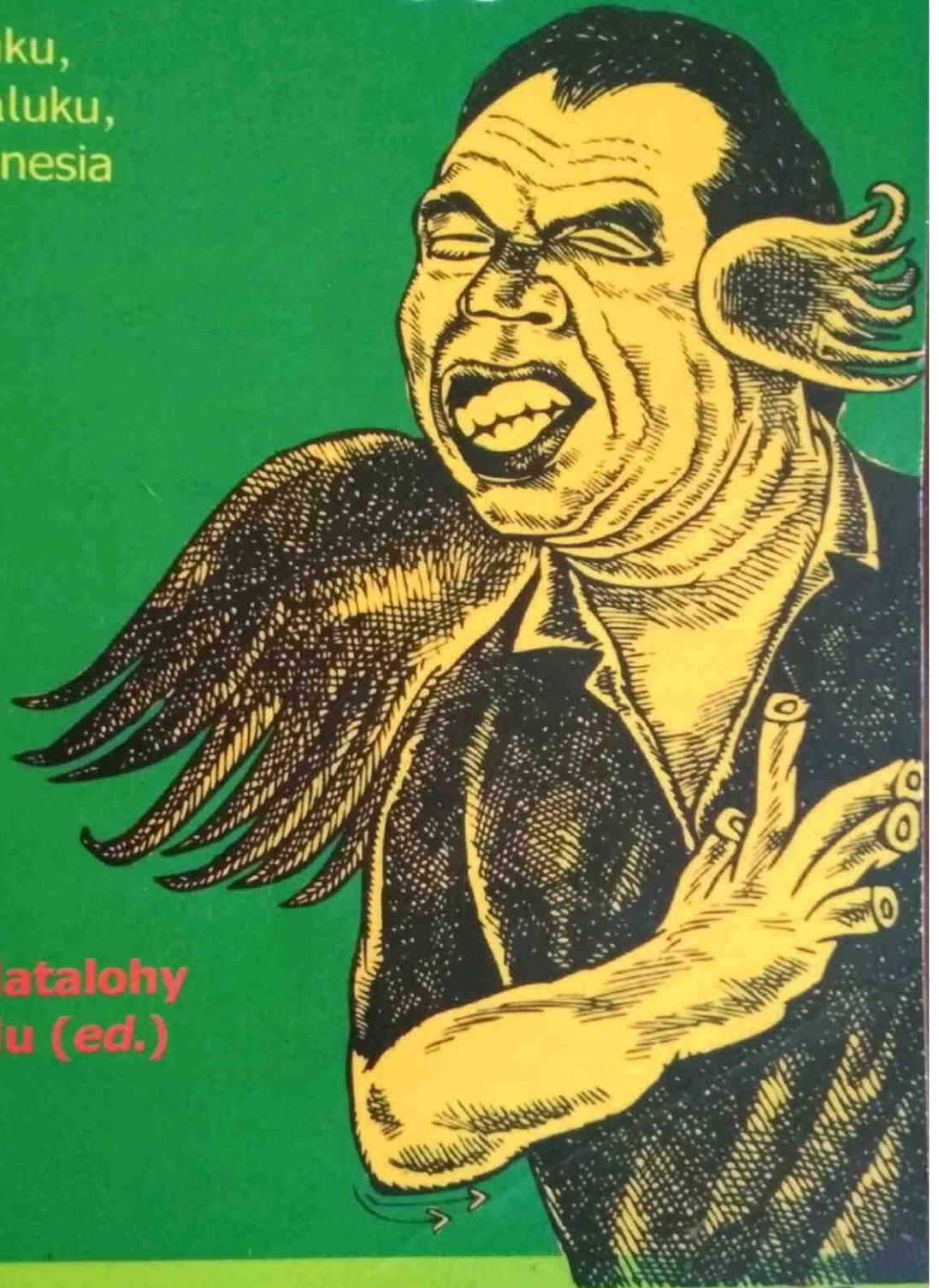


Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku,
Tentang Maluku,
Untuk Indonesia



**Fahmi Salatalohy
& Rio Pelu (ed.)**



LKIS

NASIONALISME KAUM PINGGIRAN
Dari Maluku, Tentang Maluku,
Untuk Indonesia

Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku,
Tentang Maluku,
Untuk Indonesia

**Fahmi Salatalohy
& Rio Pelu (ed.)**



LKIS

NASIONALISME KAUM PINGGIRAN
Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia
Fahmi Salatalohy & Rio Pelu (ed.)
© Saniri Satu Rasa (Satusa) dan LKiS

xxviii + 220 halaman: 13 x 18,5 cm
1. Politik dan Budaya Lokal
2. Multikulturalisme
3. Nasionalisme dan Kebangsaan

ISBN: 979-3381-44-2

Editor: Fahmi Salatalohy & Rio Pelu
Rancang Sampul: Kuss Indarto
Setting/Layout: Santo

Penerbit:
LKiS Yogyakarta
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 419924/0822743992
e-mail: elkis@indosat.net.id

Bekerja sama dengan Saniri Satu Rasa (Satusa)
Jl. Kaliurang KM. 7 Lorong Sinai No. 8 Sengkan
Sleman Yogyakarta

Cetakan I: Januari 2004

Percetakan dan distribusi:
LKiS Yogyakarta
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp/ Faks.: (0274) 419924/0822743992
e-mail: elkis@indosat.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Belum menjadi Indonesia. Tampaknya ungkapan itu tepat untuk menggambarkan Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya, sejak puluhan tahun silam. Bila Soekarno menggambarkan kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas menyongsong masa depan yang lebih baik, toh hingga hari ini kedamaian masih saja seperti barang antik, susah di cari, simbol kemewahan, dan (tentu) mahal harganya. Kalau kemudian tampak disana-sini tersedia kemewahan, kebanyakan hanyalah sebuah repro, imitasi. Kedamaian, baru tampak tersebar dalam ruang-ruang etalase, bukan yang sesungguhnya.

Kegerahan menyaksikan realitas yang mapan, melecut cendekiawan muda Maluku yang sedang studi di Yogyakarta maupun Salatiga (Jawa Tengah) untuk melakukan transformasi dan "perlawanan". Buku yang ada di tangan pembaca ini, merupakan salah satu wujud

dari komitmen mereka yang tumbuh dari pergulatan dalam komunitas SATUSA (Saniri Satu Rasa).

Keluasan perhatian dan kepedulian mereka terhadap "kampung halaman" tampak menonjol dalam tema-tema beragam yang tersaji dalam buku ini. Topik-topik aktual yang terlibat ada dalam kajian tentang ketokohan Pattimura, privatisasi agama, budaya, politik dan kebijakan pemerintahan, pendidikan, hingga tema kebangsaan dan integritas lokal.

Kaum muda progresif dari bumi "penuh konflik" ini menyebutkan bahwa buku ini merupakan antitesis dari buku-buku tentang Maluku yang tidak jelas arah dan tujuan serta sumbangsuhnya dalam penyelesaian konflik. Lebih dari itu, menjadi cermin wacana orang Maluku di perantauan dan sebagai media transformasi untuk membangun peradaban Maluku yang berkeadilan, humanis, dan religius. Dan yang tak kalah menariknya, sebagai komitmen untuk mengubah pola pikir dari tradisi tutur ke tradisi tulis.

Dalam konteks itulah, LKiS yang sejak awal memiliki komitmen membangun masyarakat transformatif, membuka kehidupan masa depan yang lebih demokratis, dan penuh penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, menyambut dan mendukung dengan kesungguhan dalam penerbitan ini. Karena kami meyakini bahwa melalui ruang dialog seperti yang tersaji dalam karya kawan-kawan muda Maluku ini akan mampu menjaga dan menghidupkan semangat intelektualitas, kejujuran, dialogis, dan terbuka.

Kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan SATUSA (Saniri Satu Rasa) yang berkenan menjalin kerjasama ini. Dan kami sangat respek dengan kehangatan mereka dalam mendialogkan segala hal untuk menghadirkan buku ini dihadapan sidang pembaca. Semoga buku ini dapat menjadi obor pencerahan, kepada masyarakat yang lebih luas. Semoga.***

PENGANTAR EDITOR

Buku ini adalah bagian dari akumulasi kesadaran intelektual yang telah lama dirindukan. Kesadaran yang dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme, diangkat untuk menjawab berbagai persoalan kedaerahan, sekalipun di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang multivarian dan kontroversial, namun tujuannya normatif, kearah transformasi kultural sebagai ekspresi identitas lokal yang tertindas.

Gagasan pembuatan buku ini berasal dari beberapa teman cendekiawan muda asal Maluku yang sedang menempuh studi di Yogyakarta dan Salatiga, yang tergabung dalam Komunitas SATUSA (*Saniri Satu Rasa*) salah satu komunitas yang menjembatani dikotomi pemikiran egalitarian, anti-pluralisme, anti-multikulturalisme yang semakin meningkat intensitas gerakannya dewasa ini.

Lewat komunitas inilah tradisi transformatif mulai dikembangkan. Pertemuan dan diskusi-diskusi ditata secara kontinyu dengan pembedahan topik yang sangat beragam, mulai dari persoalan ketokohan Pattimura, persoalan privatisasi agama, budaya, politik dan kebijakan pemerintahan, pendidikan, sampai dengan masalah kebangsaan dan integritas lokal.

Dari tradisi ini kemudian melahirkan buku yang berjudul *Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*

Tujuan diterbitkan buku ini, (1), sebagai antitesis terhadap beberapa buku sebelumnya yang mengulas tentang Maluku, di mana tidak jelas arah dan tujuan serta sumbangsuhnya untuk menyelesaikan konflik, (2), merupakan cerminan wacana orang Maluku di perantauan dan sebagai media transformasi untuk membangun peradaban Maluku yang berkeadilan, humanis dan religius, (3), sebagai komitmen untuk mengubah pola pikir dari tradisi tutur ke tradisi tulis terutama bagi generasi yang akan datang, agar mereka mampu mentransformasikan ide-ide progresif kemudian diwujudkan dalam karya nyata, seperti layaknya buku yang ada di tangan pembaca.

Ketika orang mendefenisikan identitas mereka dalam terma-terma etnik dan keagamaan, sebagian yang lain mungkin melihat hubungan itu sebagai lawan terhadap "mereka". Tetapi sebenarnya hubungan yang dikatakan sebagai "lawan" adalah keniscayaan yang harus disuarakan, dibedah dalam konteks

kemajemukan sehingga mencapai jalan keluarnya. Berbagai kearifan lokal dengan segala macam atributnya perlu ditempatkan dalam konteks yang strategis agar jangan sampai orang lain salah kaprah dan menganggapnya sebagai lawan.

Salah satu contoh adalah wacana Maluku merdeka atau tawaran-tawaran untuk membentuk wilayah federal, merupakan wacana kekinian yang harus diperjuangkan meskipun berbenturan dengan logika pemerintah. Karena di Maluku masih ada hak-hak polietnis yang dapat mempromosikan integrasi sosial dan persatuan, kewargaan. Dengan kata lain tuntutan mendasar yang melandasi hak-hak untuk memerintah sendiri bukanlah hanya berada dalam konteks beberapa kelompok yang merasa dirugikan di dalam komunitas politik namun tuntutan sebenarnya adalah lebih dari itu, bahwa kewenangan dari negara yang lebih besar tidak dapat diasumsikan untuk mendahului kewenangan dari komunitas bangsa konstituen. Apabila demokrasi adalah aturan "rakyat", tuntutan minoritas bangsa adalah lebih dari satu bangsa dan masing-masing mempunyai hak untuk mengatur diri sendiri.

Oleh karena itu, hak memerintah sendiri (federal) adalah sesuatu yang sudah harus dilengkapi dari kewargaan yang dibedakan selama ini. Karena negara sendiri telah membagi rakyat menjadi "rakyat-rakyat" terpisah, masing-masing dengan hak-hak, wilayah dan kekuasaan pemerintahan sendiri yang bersejarah, dan

oleh karenanya masing-masing harus hidup dan berkembang dengan komunitas dan sejarah politiknya pula.

Namun sejarah baru memperlihatkan bahwa sampai taraf tertentu identitas nasional harus diambil sebagai 'hadiah'. Dari pemberian itu maka sifat identitas nasional dapat berubah secara dramatis, yang hanya dijadikan sebagai sarana rekayasa konstruksi sosial identitas bangsa. Dari hasil bentukan rekayasa itu maka akan melahirkan sikap politik yang mendua antara memilih negara yang ideal atau membentuk pemerintahan sendiri yang terhormat dan berwibawa. Bagian dari tuntutan komunitas politik itu adalah pilihan-pilihan untuk menyusun kerangka Maluku baru damai dan bebas dari arogansi kekuasaan yang kosmopolit.

Tuntutan komunitas warga Maluku adalah orientasi kritik murni dan ilmiah, tidak ada unsur-unsur tendensius, apalagi sampai mendapat pengaruh dari kekuatan politik Republik Maluku Selatan (RMS). Kritik ini untuk meremukkan stigma Republik Maluku Selatan, karena dinilai telah menciptakan sugesti "cacat bawaan" bagi masyarakat, maka tidak sepatasnya wacana Maluku merdeka diidentikkan dengan kemerdekaan hasil kloning Republik Maluku Selatan.

Asumsi para penulis dititikberatkan pada problematika ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Maluku. Penindasan terstruktur (kolusi, korupsi, nepotisme dan feodalisme) yang

dilakukan pemerintah telah menggugah hati tokoh-tokoh muda Maluku untuk melakukan kritik balik terhadap pemerintah, dalam rangka mengorek naluri "kemanusiaan" pemerintah terhadap kehidupan masyarakat Maluku yang tertindas.

Gagasan tentang Maluku merdeka, lepas dari proses idiologi dan politik. Obyektifitas dan independensinya tetap pada wacana kritis dan akademis. Namun ketika wacana RMS itu menguat, maka pilihan-pilihan yang ditawarkan pun tidak bisa dihindari seperti menggagas dialog kultural atau mengajak pemerintah untuk berdialog dengan kelompok separatis.

Wacana "kemerdekaan" adalah cara lain yang ditempuh, dengan menggunakan senjata argumentasi obyektif terhadap situasi negara saat ini, tujuannya untuk menggugah kearifan pemerintah terhadap keterbelakangan, mendapat persamaan hak sebagai warga negara untuk menciptakan peluang-peluang konstruktif dalam proses pembangunan dan demokratisasi di Indonesia. Jika tidak demikian, maka lama kelamaan orisinalitas ke-Maluku-an bisa saja hilang dari pentas publik keindonesiaan.

Maluku yang mengalami marjinalisasi beberapa dekade terakhir perlu mendapat "bidikan" khusus dari pemerintah karena berdasarkan beberapa indikator peran masyarakat mengalami disfungsi dalam sekat-sekat otonomi daerah. Otonomi yang mengambil bagiannya antara roti dan kerikil adalah belunggu, suatu

paket yang membungkus kebebasan dan ketidakberdayaan masyarakat Maluku untuk memperjuangkan hak-haknya secara arif dan lebih terbuka. Jika pemerintah tidak memprioritas kebutuhan dan menempatkan kearifan lokal sesuai dengan keinginan masyarakat maka suatu hal yang mesti dihadapi dengan segala konsekwensinya adalah klaim tentang ke-Indonesiaan harus dicabut dari wilayah Maluku.

Hal ini yang kemudian melahirkan sebutan "ancaman" terhadap nasionalisme atau lebih tepatnya memudarnya nasionalisme di daerah akibat arogansi penguasa. Penguasa sendiri yang telah membuka ruang ketidakpastian perubahan dalam negara sehingga mau tak mau nasionalisme harus dipermasalahkan.

Menggugat nasionalisme atau mendaur ulang siklus integritas lokal, bukanlah perkara yang mudah, karena masyarakat perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu. Nasionalisme dan integritas lokal memiliki interdependensi satu dengan yang lain. Diantaranya nasionalisme harus memberikan jaminan keberlangsungan hidup, dan integritas lokal perlu menunjukkan sifat santunnya kepada nasionalisme, dengan sendirinya terciptalah keadilan yang universal. Namun secara nyata, nasionalisme dengan paradigmanya yang begitu luas telah meredusir hak-hak integritas lokal terutama integritas masyarakat Maluku yang tersubordinasi di pinggiran kekuasaan. Nasionalisme menciptakan harapan-harapan masif yang

berujung pada anomali keutuhannya. Dengan pemikiran seperti ini masihkah kita berbicara tentang "moralitas" sesungguhnya, atau "realitas" sesungguhnya, tentang nasionalisme? kesungguh-sungguhan hanya bersifat lokal, partikular, komuniter, primordial dan parokial, sama sekali tidak dijamak oleh penyamaratan secara umum tentang hal-hal di atas.

Semua itu telah menggiring masyarakat Maluku sebagai kelompok manusia pinggiran. Siapa pun mereka, yang hidup, di tengah, di samping atau di puncak adalah jurang kehidupan yang sangat menyakitkan. Kaum pinggiran diberanikan untuk membongkar atau mendekonstruksi rasionalitas-rasionalitas opresif dan mengubah sejarah serta masyarakat melalui diskursus "kata-kata" mereka sendiri.

Sebagai kaum pinggiran setiap saat menetap nasionalisme dengan tetesan airmata, jika nasionalisme itu lautan, maka masyarakat Maluku adalah seonggak buih di tengah lautan itu. Lautan yang kaya dengan ikan, mutiara, terumbu karangnya, berbagai jenis bunga, bahkan lautan yang dapat dilayari oleh armada kecil sampai armada militer. Setumpuk buih hanya menjadi santapan arus atau badai, berputar dan hilang bersamaan dengan cuaca laut. Nasionalisme dan personifikasi di atas perlu dikritisi.

Kami tidak melihat Nasionalisme sebagai ancaman memudarnya integritas lokal secara global. Pasti ada kemampuan dan kelebihan nasionalisme untuk

menetralisir riak-riak seperti itu. Akan tetapi sistim neo-kolonialisme dan liberalisme yang membungkus raut wajah nasionalisme sedemikian rupa sehingga nasionalisme tidak mampu menengok orang-orang yang terpinggirkan. Nasionalisme dengan wajah kusut dan badan dekil hampir mati dalam genggaman neo-kolonialisme.

Buku ini juga mencoba membuka tabir budaya lokal, karena selama empat tahun budaya Maluku mengalami proses, "mundur sepuluh ribu", (*Retreat of the Ten Thousands*). Dalam tahap pemudarnya itu, diperlukan suatu diskursus yang intensif untuk mengembalikan spirit sejati: kerukunan, toleransi, pluralisme dan orisinalitas budayanya. Budaya Maluku secara terus-menerus mengalami proses alienasi karena belum ada bentuk "kontrak sosial" untuk melakukan reformulasi sintesis terhadap semangat multikulturalisme dalam masyarakat.

Bagian dari tawaran-tawaran agar perlunya melakukan dialog kultural, seperti menghilangkan mitos terhadap sosok Pattimura, (karena klaim terhadap Pattimura lebih banyak menimbulkan arogansi desa-desa adat di Maluku), dan introspeksi terhadap kebijakan sosial politik, untuk mengangkat citra budaya lokal di digagas habis dalam buku ini.

Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Berney Adeney dan Usi Nona Risakotta, yang dengan keikhlasannya telah bersama dengan kami dalam diskusi-diskusi di pondok Tali Rasa, Om John

Titaley yang telah ersedia memberikan pengantarnya pada buku ini, Om Said Tuhuleley, yang dengan tulus memberikan pemikiran-pemikiran segar dan pluralis, Bung Glen Engko yang telah menyediakan tempat untuk aktifitas komunitas Satusa, tak lupa ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan komunitas Satusa yang memiliki semangat untuk melakukan koreksi terhadap naskah buku ini, dan terakhir ucapan terima kasih kepada pihak penerbit LKiS yang telah mensupport penerbitan buku ini sehingga membuat mimpi kami tentang buku ini menjadi kenyataan.

Yogyakarta, Oktober 2003

Editor

Fahmi Salatalohy

Rio Pelu

SEKAPUR SIRIH TOKOH MASYARAKAT

"Orang-orang tua memaklumkan perang, akan tetapi anak-anak mudalah yang bertempur dan mati. Anak-anak muda itulah yang harus mewarisi guncangan, kepedihan dan kemenangan, yang merupakan akibat dari perang," demikian dikatakan presiden 31 Amerika Serikat, Herbert Hoover tahun 1928. Perang hanya menyisakan kepedihan. Kemenangan dalam perang pun akan tetap tidak terlepas dari kepedihan. Kepedihan, karena ada yang harus menjadi korban, baik harta maupun nyawa. Kehilangan seseorang yang sangat dicintai adalah kepedihan yang besar dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kepedihan terbesar dari suatu perang sudah tentu adalah kepedihan mental kejiwaan seseorang.

Tulisan-tulisan dalam buku ini adalah cermin dari ungkapan kejiwaan anak-anak muda akibat konflik bersenjata di Maluku tahun 1999-2002. Andai saja

mereka ketahui maksud dan tujuan konflik itu, dalam pengertian untuk apa dan bagi siapa mereka "bertempur" mungkin sekali dapat mereka pahami. Akan tetapi dari berbagai tulisan yang menganalisis konflik tersebut dari berbagai sudutnya, nampaknya sah kalau mereka mempertanyakan konflik itu. Tulisan-tulisan mereka mengatakan satu hal, bahwa tidak ada kemenangan pihak mana pun dari konflik tersebut, kecuali guncangan kejiwaan dan kepedihan saja.

Konflik Maluku tersebut bisa menjadi suatu konflik besar dan berkepanjangan seperti itu, sayangnya harus melibatkan salah satu institusi sosial yang sangat dihargai dan dihormati dalam kehidupan manusia, yaitu agama. Manipulasi agama untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang bukan hal baru lagi. Sejarah perkembangan agama-agama itu sendiri juga tidaklah terlepas dari manipulasi ini. Nampaknya kita telah salah membaca sejarah perkembangan agama-agama tersebut. Kalau sejarah itu dibaca sebagai sejarah perkembangan orang atau orang-orang tertentu yang berhasil memanipulasi agama untuk kepentingannya atau kelompoknya, mungkin baru dapat kita hentikan manipulasi ini lebih lanjut. Pertanyaan yang patut dikemukakan selalu adalah, "Apakah memang Tuhan menghendaki perang untuk mencapai tujuannya? Apakah memang kehendak Tuhan untuk membunuh manusia dalam perang untuk mencapai tujuannya? Tuhan seperti apakah itu?"

Memahami kehendak Tuhan adalah sesuatu yang tidak mudah. Baru saja kita menyaksikan tragedy keagamaan yang menyangkut ini. Geger kiamat sekte Pondok Nabi di Bandung beberapa waktu terakhir ini, terjadi akibat seseorang menyatakan dirinya berbicara dengan Tuhan lewat puasa dan meditasi. Begitu yakinnya ia akan percakapannya dengan Tuhan, sehingga ada banyak pengikutnya yang rela mengorbankan harta bendanya. Ketika lewat tanggal kiamat dan kiamat tidak terjadi, maka pertanyaannya adalah, apakah memang itu suara Tuhan? Pertanyaan ini patut dikemukakan, karena dalam sejarah agama-agama Tuhan nampaknya tidak berbicara dengan orang-orang tertentu lewat percakapan seperti bertelepon, atau ketika Tuhan menyatakan kehendakNya, itu tidak dilakukannya melalui fax. Hanya ada getaran ada tanda-tanda tertentu yang dapat dipahami secara intuitif saja, sehingga harus ditafsirkan oleh orang-orang tersebut sebagai berasal dari Tuhan. Kebenaran tafsir itu bahwa itu berasal dari Tuhan baru akan menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari (sejarah). Ketika hal itu tidak terbukti, menjadi jelas bahwa itu bukanlah Tuhan.

Apa yang terjadi di Maluku dan "pemberontakan" orang muda dalam buku ini membuat kita harus memikirkan ulang hakikat beragama kita. Salah satu sebab yang membuat kita harus meninjau ulang hakikat beragama kita, karena penghargaan terhadap hidup kemuanusiaan seseorang kini sudah sedemikian

tingginya, sehingga hak asasi manusia kini telah menjadi persyaratan yang tidak terhindarkan lagi dalam kehidupan manusia.

Oleh karenanya, Etika Global yang dirumuskan oleh para pemuka agama sedunia tahun 1993 adalah tonggak sejarah kehidupan beragama yang tidak boleh terabaikan begitu saja. Paradigma dasar Etika Global itu adalah "Setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi." Paradigma inilah yang sejajar dengan penghargaan yang tinggi atas hak asasi manusia itu.

Kalau penghargaan terhadap kemanusiaan dengan segala keberadaannya, baik pandangan hidupnya, agamanya, latar belakang sosial dan ekonominya, dan gender sudah dihormati, dapat dipahami sebagai wujud dari Tuhan yang tidak bertindak sewenang-wenang terhadap manusia, maka mata rantai manipulasi agama bisa dipatahkan. Tuhan tidak bisa lagi dipakai sebagai legitimasi untuk membunuh orang lain. Kalau pun terjadi perang, itu harus dipahami sebagai perbedaan antar manusia yang tidak terselesaikan secara damai. Itu bukan kehendak Tuhan karena Tuhan tidak bermaksud untuk menghilangkan kehidupan manusia.

Pematahan mata rantai itu harus berasal dari kaum agamawan itu sendiri, karena di tangan merekalah arah pembinaan umatnya ditentukan. Masalah yang sering muncul adalah, para pemimpin ini sering sudah tidak bisa membedakan dirinya sendiri dengan Tuhan, sehingga mereka telah menjadi tuhan atas umatnya

sendiri. Ketika sudah sampai kesitu, sebenarnya mereka telah menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan keagamaan mereka.

Mudah-mudahan jeritan kaum muda ini bisa mendapatkan perhatiannya dari sisi ini.

Salatiga, 17 November 2003

John A. Titaley
Rektor UKSW Salatiga

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	◆ v
Kata Pengantar Editor	◆ vii
Sekapur Sirih Tokoh Masyarakat	◆ xvii
Daftar Isi	◆ xxiii

BAGIAN I BUDAYA MALUKU DALAM DISKURSUS ◆ 1

Belajar Dari Kasus Aceh Menggagas Dialog Kultural

Hasbollah Toisuta ◆ 3

Persinggungan Identitas Lokal Dengan Kekuasaan Negara Sebuah Kecurigaan Hermeneutik

Abdin Wakano ◆ 13

Budaya POP Maluku

Rudolf Rahabeat ◆ 21

Membangun Etika Multikulturalisme

Fahmi Salatalohy ◆ 27

Menjernihkan Kembali Ruang Hidup Maluku

Rudolf Rahabeat ◆ 33

BAGIAN II SOSIAL POLITIK & KEMASYARAKATAN ♦ 39

- Masyarakat Post Etnik**
Rudolf Rahabeat ♦ 41
- Membangun Sikap Keberagaman Yang Saling Menyapa**
Hasbollah Toisuta ♦ 47
- Maluku Baru dan Peran Media Politik**
Fahmi Salatalohy ♦ 57
- Demokratisasi Potensi Jender dalam Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat**
Eka Dahlan Uar ♦ 65
- Menata Kembali Relasi Polisi-Masyarakat di Maluku (Kritik atas “ketidak berdayaan” Polisi mengatasi Konflik Maluku)**
M. Abdul Nahumarury ♦ 75

BAGIAN III PERSOALAN PENGUNGS ♦ 83

- Kebijakan Pemerintah Mengenai Persoalan Pengungsi Dibidang Pertanahan Di Maluku Akibat Konflik**
Rio Pelu ♦ 85
- Penanganan Pengungsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia**
Theo Litaay ♦ 91
- Ibu Negeri Tanah Maluku**
Waldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ♦ 101

BAGIAN IV OTONOMI DAERAH ♦ 107

- Pemekaran Wilayah, Roti atau Kerikil**
Fransz Siahaya ♦ 109
- Federalisme, Jawaban terhadap Tuntutan Disintegrasi Bangsa**
Abubakar kabakoran ♦ 115
- Otonomi Daerah dan Implikasi terhadap Partai Politik**
Theo Litaay ♦ 137

BAGIAN V SERI DIALOG 1 : REFLEKSI KEMERDEKAAN ♦ 147

- Refleksi 17 Agustus Bagi Masyarakat Maluku**
Rio Pelu ♦ 149
- Apa Arti Merdeka Bagi Maluku**
Waldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ♦ 155
- Emansipasi Kemanusiaan Maluku**
Abidin Wakano ♦ 163
- BETA ORANG MALUKU (Catatan Pinggir Terhadap Etnisitas dan Eksistensi Orang Maluku**
Yance Rumahoru ♦ 167
- Mencari Kemerdekaan? Belajar Dari Orang Papua**
Fahmi Salatalohy ♦ 175
- SERI DIALOG 2 : BUDAYA MALUKU DALAM DISKURSUS** ♦ 187

Raibnya Integritas Lokal

Fahmi Salatalohy ♦ 189

"Tanggapan" Raibnya Integritas Lokal

Bemey Adeney-Rissakotta ♦ 195

Memperjelas Budaya Lokal

Weldemina Yudit Tiwery - Pattikawa ♦ 201

Tanggapan Balik Tentang Integritas Lokal

Fahmi Salatalohy ♦ 205

SERI DIALOG 3 : TENTANG PATTIMURA ♦ 209

Rudolf Rahabeat ♦ 212

Abidin Wakano ♦ 214

Tentang para Penulis ♦ 217

Bagian I

Budaya Maluku dalam Diskursus

Siapa yang harus menjaganya? Negara, dalam hal ini pemerintah.

Kewajiban pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia dijamin dalam hukum nasional Indonesia (UU HAM) maupun Hukum internasional baik dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 9, 13, 14 dan 15), Konvensi mengenai Status Pengungsi (Pasal 3, 4, 21, 22, 23, 24, 26, 33 dan 34), Konvensi anti Penyiksaan (Pasal 3), Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan penduduk sipil saat perang (Pasal 44), Protokol tambahan Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 73), Konvensi Pencegahan Genosida (Pasal 1), Kovenan Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 2, 12, 13, 14, dan 26), Kovenan Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 11, 12, dan 13), Konvensi Penghapusan Diskriminasi (Pasal 2, 5, dan 6), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Pasal 9), Konvensi Hak-hak Anak (Pasal 7 dan 22).

Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah penanganan pengungsi, pertanyaannya apakah sudah cukup? Kemauan yang sudah dilaksanakan itu perlu dikuatkan lagi dalam tindakan penanganan pengungsi.

Tugas pemerintah memang berat, tetapi bukankah untuk itulah pemerintah dibentuk?

IBU NEGERI TANAH MALUKU

Oleh: Weldemina Yudit Tiwery-Pattikawa

Kota Ambon Ibu negeri tanah Maluku
Di pinggir laut dahulu beta di situ
Dari jauh terlihat gunung Salahutu...

Kutipan di atas adalah sepenggal syair lagu Kota Ambon yang sering dinyanyikan dan sangat akrab dengan kehidupan anak-anak Maluku. Lagu tersebut menggambarkan kerinduan hati dari anak-anak negeri yang merantau jauh dari Ambon yang manis, nyiur yang melambai di atas pantai pasir putih, lautnya yang membiru dan teluknya yang indah, sungguh suatu panorama negeri yang mempesona. Saya merasa tertarik untuk mengurai lebih lanjut makna yang terdalem dari syair lagu tersebut, lebih khusus pada kata "Ibu Negeri".

Berbicara tentang ibu, berarti berbicara tentang hidup. Suatu proses kehidupan dan bukan kematian. Mengurai tentang suatu proses kehidupan berarti

mengurai tentang ibu, sebab kehidupan selalu di mulai "di dalam" sang ibu. Kehidupan di mulai "di dalam" sang ibu, menunjuk kepada suatu integritas yang utuh antara sang ibu dan kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu tumbuh di dalam sang ibu, bukan di luar apa lagi di belakang. Kehidupan itu berproses mulai dari rahim sang ibu, bagian dari tubuh sang ibu, menyatu erat tidak terpisahkan. Dalam proses seterusnya, kehidupan itu menerima daging dan darah darinya, ia bergerak dan hidup di dalamnya, ia bernafas bersamanya. Dengan lembut, hangat, damai dan aman penuh cinta kasih, kehidupan itu di peluk di dalam rahim, di gendong kemanapun perginya. Dengan tenaga dan pengharapan, sang ibu merawat dan memelihara kehidupan di dalamnya tanpa diskriminasi, laki-laki atau perempuan, beda agama atau sama agama, beda budaya atau sama, ia tetap memelihara dan menjaga dengan cintanya.

Maluku, tanah Maluku adalah Ibu dari jutaan manusia Maluku. Tanah Maluku, entah itu di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Buru, Maluku Tengah dan Ambon adalah sumber kehidupan anak Maluku, agama dan jati diri anak Maluku.

Tanah Maluku adalah Ibu kita, yang di dalam rahimnya kita hidup, menerima daging dan darah darinya. Di dalam rahimnya tersimpan tumpukan harta kekayaan yang merupakan warisan atau bekal hidup anak-anaknya. Di dalam rahimnya terkandung warisan budaya yang mengajarkan tentang cinta kasih antar

sesama sebagai saudara segandong, ia memeluk dan menyelimuti anak-anaknya dengan selimut hangat pela gandong, sehangat desah nafasnya.

Pada perut ibu negeri ini, kita semua anak-anak Maluku mencari dan mendapat akar kehidupan kita. Kita bebas menyembah Allah menurut Agama dan kepercayaan kita, dan sang ibu terus membelai, memberikan sentuhan-sentuhan religiusitas, menyanyikan bagi kita nyanyian damai, sebab ketika anak-anaknya bertengkar, sang ibu merasakan sakit yang luar biasa, maka ketika terjadi pertumpahan darah antar anak-anaknya, sama artinya dengan rahim sang ibu mengeluarkan darah, sakit, ngeri tak tertahan.

Maluku Ibu Negeri yang meratap

Tanah Maluku adalah ibu kita, merusak tanah Maluku berarti merusak hidup anak-anaknya, menggagahi tanah Maluku sama dengan menggagahi hidup anak-anaknya, menghancurkan tanah Maluku sama dengan menghancurkan hidup satu generasi kehidupan dan peradabannya.

Merobek rahimnya, sama dengan membunuh masa depan anak-anaknya secara dini, mengobarkan perang di dalamnya sama dengan berperang menghabisi anak-anaknya, anak dengan anak saling membunuh.

Ibu kita terus menangis, ia menangisi hidup yang telah diputuskan darinya. Darah anak-anaknya adalah

darahnya juga, rahim yang awalnya melahirkan kehidupan terpaksa menganga menelan bangkai anak-anaknya sendiri.

Ibu negeri, Ibu bagi kita semua, anak-anak itu tersebar ada yang di pegunungan, ada yang di pesisir pantai, ada yang jauh di sudut-sudut desa, ada yang hidup di pinggiran kota, ada pula yang hidup di kota, sejengkal tanah Maluku yang menjadi tempat kita berpijak adalah ibu kita, ibu bagi mereka di MTB, ibu bagi mereka di Maluku Tenggara, ibu bagi mereka di Buru, ibu bagi mereka di Maluku Tengah, ibu bagi mereka di Ambon, semua kita satu ibu, kita hidup dalam satu rahim, kita hidup dari darahnya dan bernapas darinya.

Ibu kita, kini kesepian, ia ingin melihat anak-anaknya kembali bermain bola bersama, bermain enggo lari bersama di kintal tanpa sekat pemisah pada saat bulan purnama, ia ingin mendengar lagu dan doa anak-anaknya dari mesjid maupun gereja. Sudah cukup lama ibu kita menangis, sudah cukup lama ibu kita di zalimi, cukup lama ibu kita di khianati, ia belum mau di hibur sebelum anak-anaknya kembali. Mari kita dengarkan apa yang menjadi harapannya pada saat-saat tenang, saat damai kini bergayut merendah hidup anak negeri.

Harapan Ibu Negeri

Para pengungsi adalah anak-anaknya, biarkanlah mereka kembali ke pangkuannya, yakni kampung

halaman mereka. Membiarkan para pengungsi tidak kembali, sama dengan memutuskan tali napas mereka dengan ibu mereka, sebaliknya mengembalikan mereka berarti mengembalikan mereka kedalam rahim ibunya yang teduh, damai penuh kehidupan sejati.

Ia, ibu kita sendirian dalam keadaan sunyi, bisu, tak terawat, ditumbuhi semak belukar. Ia mengharap hadirnya anak-anak untuk bercanda ria dengannya agar tidak sepih, ia ingin ada warna kehidupan di sana bukan seperti kuburan yang sunyi. Ia terus berharap, "kembalikan anak-anakku ke pangkuanku" ia mengulur tangan, membukanya lebar, menanti kembalinya anak-anak hilang. Tercerai dengan ibu, ternyata melahirkan penderitaan yang tak berujung.

Situasi yang aman dan damai telah terasa, anak-anak negeri telah saling mengunjungi, saling bersua, melepas rindu. Tentu saja suasana seperti ini membuat ibu kita tersenyum. Air mata dukanya telah terhapus. Ibu adalah ibu, kasihnya, cintanya, tulus tanpa pamrih. Ada segunung harapan yang masih harus dilaksanakan. Ia tidak terlalu menuntut, ia mudah sekali memaafkan, andai suaranya bisa di dengar, dengan lantang ia berkata: Kembalikan anak-anakku yang tercerai berai, jangan hanya janji, jangan jadikan mereka sebagai komoditi politik untuk meraih keuntungan pribadi dan popularitas murahan.

Ibu itu adalah tanah Poka, tanah Batu merah, tanah Iha, tanah Kesui dan Teor, tanah Kariu, tanah Tanah Goyang, tanah Siaputih, tanah Lokki, tanah Banda,

tanah Waihaong, tanah Kuda Mati, tanah Wara/
Gunung nona dan seterusnya.

Akankah harapan sang Ibu terwujud dalam waktu dekat atau masih menunggu dalam rentang waktu yang tidak menentu? Kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para anggota Dewan yang terhormat, siang dan malam sang ibu memintal harapan, kepada anda sekalian harapan itu tertuju. Adakah niat tulus dan jujur untuk mewujudkannya ? Katakan kepada sang ibu, sampai kapan ia menunggu agar ia tidak meyakini harapannya bukan sesuatu yang utopis.

Bagian IV

Otonomi Daerah

TENTANG PARA PENULIS

Hasbollah Toisuta, lahir di Siri Sori Islam, 29 Januari 1966, menempuh pendidikan strata satu Fak. Syariah IAIN Alauddin Ambon, S2 pada IAIN Alauddin Makassar, sekarang tercatat sebagai peserta program Doktor dengan konsentrasi Islamic Studies di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semasa mahasiswa aktif di HMI Cabang Ambon. Salah satu deklarator Perjanjian Maluku di Malino. Selain itu juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Agama, Sosial Budaya Majelis Wilayah KAHMI Maluku, disamping sebagai anggota pleno Badan Imarah Muslim Maluku (BIMM).

Eka Dahlan Uar, Putri Wandan Ely, lahir di Tual, tahun 1966, alumni IAIN Alauddin Ambon, sekretaris DPD Al-Hidayah. Sekarang tercatat sebagai mahasiswa Pasca Sarjana Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Fahmi Salatalohy, lahir di Siri Sori Islam Kec. Saparua, 1 Desember 1969, alumni Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat IAIN Alauddin Ambon, mantan Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Maluku, kolumnis Ambon Ekspres, dan sekarang ini sedang menempuh Program Magister Filsafat Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Theo Litaay, Lahir di Ambon Tahun 1970, Lulusan Sarjana hukum di UKSW Salatiga dan LLM di Vrije Universiteit Amsterdam tahun 2002. Staf pengajar pada Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

Abubakar Kabakoran, "Yanat Evav Toyando", lahir di Tual Tahun 1970, ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, mantan staf Ketua HMI Cabang Ambon dan Badko Maluku-Irian Jaya, lulusan IAIN Alaudin Ambon. Sekarang menempuh studi di Yogyakarta pada Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada

Abidin Wakano, Putra Latu, lahir di Kairatu, 5 April 1973, adalah mahasiswa Program Doktor di IAIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi Islamic Studies, Sebelum hengkang ke Yogyakarta selama menmpuh studi S1 dan S2 di Makassar aktif dalam pelbagai organisasi, di antaranya Ketum LDMI-HMI Cabang Makassar, Kabid. KU Badko HMI Sulawesi, LSIC Makassar dan Koordinator Program Forum Dialog (FORLOG) ANTAR KITA SUL-SEL. Saat ini aktif di Dian-Interfidei Yogyakarta.

Yance Z. Rumahuru, lahir di Horale Seram Utara 7 Juni 1973, menyelesaikan studi sarjana pada Fakultas Filsafat Agama UKIM Ambon. Saat ini sedang melanjutkan studi pada program Magister Inter-Religious and Cross-Cultural Studies UGM Yogyakarta. Sekarang sebagai koordinator umum SATUSA Community.

Weldemina Yudit Tiwery-Pattikawa, lahir di Lawawang, MTB 23 Januari 1975. Studi S1 pada Fakultas Teologi UKIM Ambon. Staf Pengajar STAKPN Ambon. Saat ini sedang menempuh studi pada Program Magister Teologi Universitas Sanata Dharma, konsentrasi studi Teologi Feminis.

Rudolf Rahabeat, lahir di negeri Hatu Maluku 20 Maret 1975. Belajar agama secara formal di Fakultas Teologi UKIM lulus tahun 1999. Hengkang ke Yogyakarta dan sedang main-main' di Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Rio Z.M. Pelu, lahir di Ambon, Tahun 1975, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon periode 1998-2000, lulusan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sekarang sedang merampungkan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

M. Abdul Nahumarury, lahir di Tulehu, 2 Nopember 1975, gelar S1 Teknik Mesin dari Fak. Teknik Universitas Darussalam Ambon tahun 1999, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon periode 2000-2001,

sementara menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM Yogyakarta

Fransz Siahaya, alumni fakultas Geografi, Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Nasionalisme Kaum Pinggiran

Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia



Buku yang ditulis oleh generasi muda Indonesia asal Maluku ini menjadi menarik, sebab ia lahir dari sebuah kesadaran sejarah yang muncul secara sangat kuat sebagai akibat dari penderitaan panjang yang disebabkan oleh disintegrasi yang nyaris sempurna yang terjadi selama kurang lebih tiga tahun di Maluku. Di sinilah sebenarnya letak kekuatan buku ini, karena di samping ia lahir sebagai percikan permenungan dari anak-anak muda terdidik yang memiliki kesadaran sejarah yang tinggi, tetapi lebih dari itu, buku ini sesungguhnya merupakan cerminan dari kerinduan akan integrasi nasional maupun lokal, yang sebenarnya ada dalam dada setiap orang Maluku, sebagaimana semboyan dari Saparua: "Salam Sarane karja rame-rame" (orang Islam dan Kristen bekerja bersama-sama).

(Said Tuhuleley)

ISBN 979-98101-0-8

